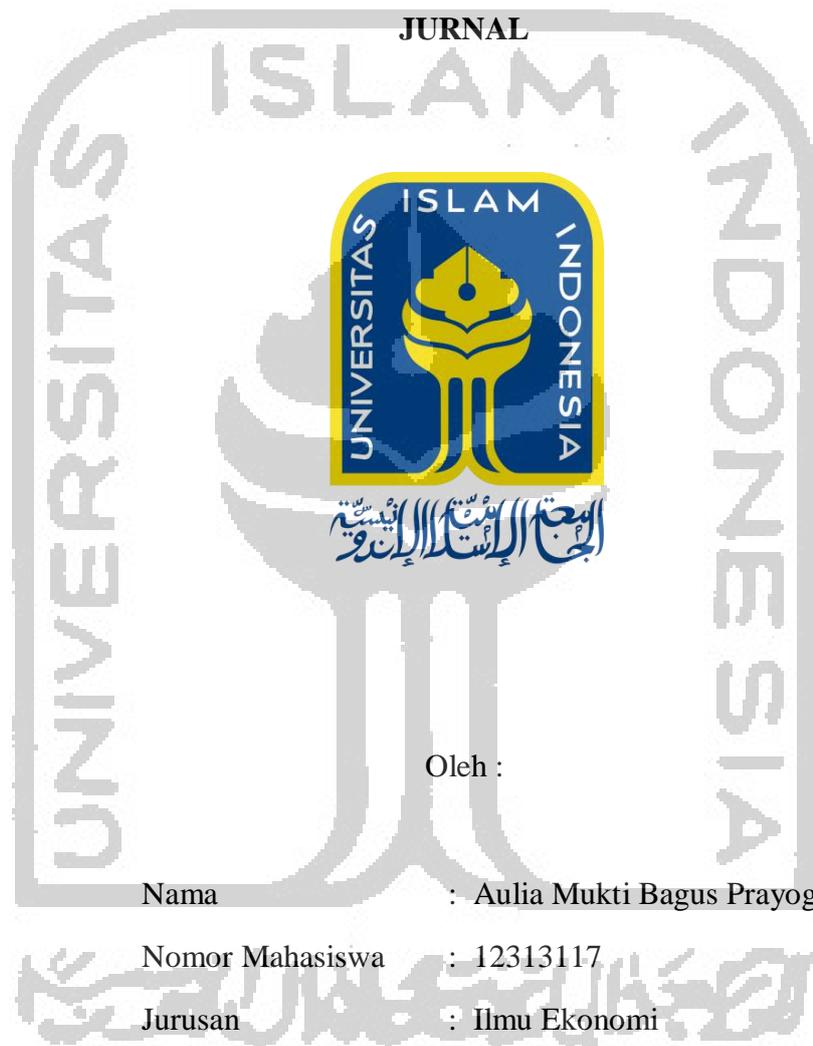


**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN DAN
BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2003 – 2018**



**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA**

2019

PENGESAHAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah
Terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode 2003 – 2018

Nama : Aulia Mukti Bagus Prayoga
Nomor Mahasiswa : 12313117
Jurusan : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 4 Oktober 2019
Telah disetujui dan disahkan oleh
Dosen Pembimbing,

Subarto, SE., M.Si

كَلِمَاتُهَا تَنْقِذُكَ مِنَ الْغَمِّ

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN DAN
BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2003 – 2018**

Aulia Mukti Bagus Prayoga

Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

ambagusprayoga@gmail.com

Abstrak

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki struktur perekonomian yang sangat beragam, mata pencaharian masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta mayoritas adalah bercocok tanam, pedagang, dan pengrajin. Di lihat dari segi perekonomian, sektor pendidikan dan sektor pariwisata menjadi sektor utama perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tetapi dengan keberagaman sektor yang ada masih terdapat banyak penduduk miskin. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2) Menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 3) Menganalisis pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, 4) Menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah secara bersama-sama terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* (runtut waktu) dengan menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression analisis*) periode 2003 sampai 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap Kemiskinan, Pengangguran berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Kemiskinan, Belanja Pemerintah tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Kemiskinan, dan secara bersama-sama ketiga variabel Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.

Kata kunci: Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah dalam perekonomian suatu negara dan telah yang menjadi perbincangan dari berbagai kalangan, mulai dari masyarakat awam, politikus, hingga para akademisi. Kemiskinan didefinisikan sebagai kualitas hidup yang rendah atau kondisi ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi dalam mencukupi kebutuhan pokoknya. Kondisi ini dapat diidentifikasi dengan tingkat pendapatan yang rendah sehingga seseorang tidak mampu untuk mencukupi standar kebutuhan pokoknya, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

Penyebab kemiskinan dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor, tetapi secara garis besar kemiskinan dapat ditimbulkan oleh adanya perbedaan, baik perbedaan kemampuan, perbedaan kesempatan maupun perbedaan sumberdaya. Kemiskinan jika dilihat dari dampaknya dapat menimbulkan suatu kondisi dimana seseorang atau masyarakat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasarnya, sehingga seseorang atau masyarakat tersebut dikatakan tidak mampu untuk mencapai standar kebutuhan hidup yang layak dan akan mengakibatkan persoalan sosial dan ekonomi (Maipita. I, 2014: 3).

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dalam mengukur kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dari sisi ekonomi guna memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya, dengan kata lain penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan adalah penduduk miskin. Garis Kemiskinan (GK) adalah jumlah penghitungan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dengan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Tabel 1 Jumlah Kemiskinan D.I. Yogyakarta periode 2003-2018

No	Tahun	Kemiskinan (Ribuan Jiwa)
1	2003	636.8
2	2004	616.2
3	2005	625.8
4	2006	648.7
5	2007	633.5
6	2008	608.9
7	2009	544.9
8	2010	540.5
9	2011	564.2
10	2012	565.7
11	2013	541.9
12	2014	532.5
13	2015	550.2
14	2016	494.9
15	2017	488.5
16	2018	460.1

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019

Penurunan dalam jumlah kemiskinan mengindikasikan bahwa pembangunan yang dijalankan disuatu wilayah membawa sebuah keberhasilan. Saat perekonomian di suatu wilayah dapat berkembang, tentu akan menambah pendapatan yang dapat dibelanjakan, yang jika terkelola dengan baik akan berdampak pada penurunan kemiskinan di wilayah tersebut. Hal ini berarti, pertumbuhan ekonomi memiliki andil yang penting dalam mengatasi penurunan jumlah kemiskinan (Kuncoro dalam Asrianti, 2017).

Pertumbuhan ekonomi dapat menjadi tolak ukur dalam suatu pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di suatu wilayah. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki hubungan yang sangat erat dengan permasalahan kemiskinan, baik hubungan secara menyeluruh maupun hubungan secara individu pada sektor ekonomi.

Tabel 2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta periode 2003-2018

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2003	4,58
2	2004	5,14
3	2005	4,73
4	2006	3,69
5	2007	4,31
6	2008	5,02
7	2009	4,39
8	2010	4,87
9	2011	5,16
10	2012	5,32
11	2013	5,40
12	2014	5,18
13	2015	4,95
14	2016	5,05
15	2017	5,41
16	2018	7,50

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019

Pengangguran merupakan masalah utama yang dihadapi di kebanyakan wilayah. Pengangguran menjadi permasalahan sosial didalam masyarakat yang mayoritas hidup dalam perekonomian menengah ke bawah dan akan menyebabkan produktivitas serta pendapatan masyarakat menjadi berkurang sehingga akan menimbulkan kemiskinan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti penambahan jumlah penduduk, kemajuan teknologi, tingkat urbanisasi yang tinggi, ketidakmampuan pemerintah serta sektor swasta dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang seimbang serta banyaknya pencari kerja yang yang tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan turut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya pengangguran di suatu wilayah.

Menurut Sukirno, S dalam Susiatun, E (2018) pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang yang tergolong ke dalam golongan angkatan kerja dan berkeinginan untuk mendapatkan pekerjaan tetapi belum bisa memperoleh pekerjaan. Seseorang atau sekelompok orang yang sedang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak termasuk ke dalam golongan pengangguran.

Masalah pengangguran dapat menyebabkan efek buruk yang bersifat ekonomi ataupun bersifat sosial. Untuk menghindari berbagai efek buruk yang ditimbulkan, pemerintah perlu secara terus-menerus mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pengangguran. Perlu adanya berbagai kebijakan dari pemerintah untuk dijalankan dengan tujuan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menurunkan jumlah pengangguran.

Tabel 3 Jumlah Pengangguran D.I. Yogyakarta periode 2003-2018

No	Tahun	Pengangguran (Ribuan Jiwa)
1	2003	143.89
2	2004	113.56
3	2005	93.50
4	2006	117.02
5	2007	115.20
6	2008	107.33
7	2009	121.04
8	2010	107.14
9	2011	83.48
10	2012	76.81
11	2013	63.17
12	2014	67.41
13	2015	80.24
14	2016	57.03
15	2017	64.01
16	2018	73.35

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019

Intervensi atau campur tangan dari pemerintah didalam perekonomian akan selalu ada. Peranan pemerintah dalam suatu perekonomian adalah sebagai aktor yang melaksanakan tugas serta fungsi daerah. Berbagai kebijakan dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat disuatu daerah. Salah satu kebijakan dari pemerintah dalam mengelola perekonomian suatu daerah adalah belanja pemerintah yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan ditujukan untuk manajemen kebutuhan publik. Ketetapan dalam penggunaan belanja pemerintah yang ideal adalah yang dapat memicu aktifitas ekonomi dan mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan publik.

Tabel 4 Jumlah Belanja Pemerintah D.I. Yogyakarta periode 2003-2018

No	Tahun	Belanja Pemerintah (Ribu Rp)
1	2003	524.487.355
2	2004	670.712.040
3	2005	768.498.592
4	2006	968.386.066
5	2007	1.067.390.920
6	2008	1.629.069.251
7	2009	1.412.048.985
8	2010	1.394.446.100
9	2011	1.590.785.711
10	2012	2.053.825.959
11	2013	2.509.643.374
12	2014	2.981.068.320
13	2015	3.911.107.930
14	2016	4.270.072.673
15	2017	5.279.617.119
16	2018	5.608.293.291

Sumber : BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2019

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018?
2. Apakah Pengangguran berpengaruh terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018?
3. Apakah Belanja Pemerintah berpengaruh terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018
2. Mengetahui pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018
3. Mengetahui pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018
4. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah secara simultan atau bersama-sama terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018

KAJIAN PUSTAKA

Waruwu, S.J (2016) pada penelitiannya tentang “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014”, peneliti

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), data Bank Indonesia (BI), data BAPPENAS dan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang terdiri dari data kemiskinan, data pertumbuhan ekonomi, data pengangguran, data belanja pemerintah dan data investasi dari tahun 1995 sampai tahun 2014. Peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan, pengangguran berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan, belanja pemerintah berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan, sementara investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1995-2014.

Asrianti (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia periode 2007 sampai dengan 2016 berupa data sekunder dan menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan pengangguran secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kemiskinan di Indonesia, sedangkan belanja pemerintah tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2007-2016.

Nisbah, F (2018) pada penelitiannya menggunakan data sekunder. Data pada penelitian ini diperoleh peneliti dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara dan menggunakan teknik analisis regresi data panel yaitu kombinasi antara data *time series* dan *cross section*. Hasil penelitian pada “Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo dan Langkat” ini bahwa pengangguran memiliki hubungan positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan memiliki hubungan positif.

Susiatun, E (2018) pada penelitiannya tentang “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2007-2016”, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang berkaitan dengan data pertumbuhan penduduk, data pengangguran dan data kemiskinan di Provinsi Lampung. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Kesimpulan pada penelitian ini pertumbuhan penduduk dan pengangguran secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung dan kemiskinan menunjukkan gejala yang tidak tetap dan selalu berubah atau mengalami fluktuasi.

Fadlillah, N et al. (2016) dalam penelitian tentang “Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013” menggunakan analisis data panel dan menghasilkan kesimpulan bahwa pendapatan per kapita dan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan negatif, tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.

Irhamni (2018) dalam penelitian “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 1986-2015” menggunakan data sekunder berupa data *time series* tahun 1986 sampai dengan tahun 2015 yang meliputi data jumlah penduduk miskin, data pengangguran dan data pengeluaran pemerintah yang bersumber dari Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS) serta *World Bank*. Peneliti menggunakan metode analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*). Hasil dari penelitian ini adalah jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran pemerintah secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Jumlah penduduk dan pengangguran memiliki hubungan positif terhadap kemiskinan, sedangkan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif.

Fasholla, R.T (2018) dalam penelitian tentang “Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2011-2016” menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cilacap serta Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Cilacap. Peneliti menggunakan metode analisis data panel yaitu kombinasi antara data *time series* dan *cross section* dan menghasilkan kesimpulan bahwa belanja daerah dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan dan berhubungan positif, sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan tetapi berhubungan negatif terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten Cilacap.

LANDASAN TEORI

Kemiskinan

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi hak-hak dasarnya berupa makanan, perumahan, pendidikan, air bersih, kesehatan, pekerjaan, pertanahan, sumber daya alam, sumber daya lingkungan, terbebas dari kriminalisme, dan hak untuk beradaptasi dalam kehidupan sosial guna mengembangkan serta mempertahankan kehidupan yang lebih baik.

World Bank (2001) mengartikan kemiskinan sebagai “*Poverty is to be hungry, to lack shelter and clothing, to be sick and not cared for, to be illiterate and not schooled*”. Kemiskinan berarti kelaparan, ketiadaan tempat tinggal dan pakaian, menjadi sakit dan tidak dirawat, buta huruf dan tidak sekolah. Dalam bentuk sederhana kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan yang sering diukur dengan tingkat kesejahteraan.

Pertumbuhan Ekonomi

Definisi pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses perubahan dalam kegiatan perekonomian suatu daerah yang mengakibatkan bertambahnya hasil

produksi yang dihasilkan oleh masyarakat sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan (Sukirno, S, 2011: 9). Peningkatan hasil produksi serta pendapatan masyarakat akan membuat pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat yang dapat ditunjukkan oleh besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi telah berjalan dengan baik.

Tarigan dalam Suryani, E (2006) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai pertambahan pendapatan masyarakat suatu daerah yang terjadi secara menyeluruh berupa kenaikan pada keseluruhan nilai tambah (*added value*).

Pengangguran

Menurut Mankiw, N.G, (2006: 154) pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang paling berat dan dapat mempengaruhi manusia secara langsung. Hal itu dikarenakan saat seseorang kehilangan suatu pekerjaan akan mengakibatkan penurunan standar kehidupan, yang pada akhirnya akan berdampak pada kecemasan psikologis. Masalah pengangguran kerap diperdebatkan dalam suatu debat politik dan menjadi pembahasan yang sudah tidak asing lagi bagi para politisi bersamaan dengan tawaran kebijakan untuk menyediakan lapangan pekerjaan agar dapat membantu menurunkan jumlah pengangguran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan pengangguran sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha, penduduk yang sedang mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Belanja Pemerintah

Definisi belanja daerah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah pada Pasal 1 Ayat 13 adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Belanja Daerah dalam Fasholla, R.T (2018), belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran karena dalam menyusun laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi serta fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja dalam melaksanakan suatu aktifitas.

METODE ANALISIS

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, pengangguran dan belanja pemerintah. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu kemiskinan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda (*multiple*

regression analysis) dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square = OLS*) dan menggunakan alat pengolahan data *Eviews 7*. Berikut persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini :

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + e_t$$

Keterangan :

Y	=	Kemiskinan (ribu jiwa)
β_0	=	Koefisien Intersep
β_1	=	Koefisien Pertumbuhan Ekonomi
β_2	=	Koefisien Pengangguran
β_3	=	Koefisien Belanja Pemerintah
X_1	=	Pertumbuhan Ekonomi (persen)
X_2	=	Pengangguran (ribu jiwa)
X_3	=	Belanja Pemerintah (ribu rupiah)
e	=	<i>Standard error</i>
t	=	Waktu

Sehubungan dengan pemakaian metode metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*), untuk mendapatkan model regresi yang layak, data yang ingin di regresi pada penelitian ini harus memenuhi uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji normalitas, uji linearitas dan uji heterokedastisitas. Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini digunakan alat uji statistik dengan uji koefisien regresi individual (Uji T), uji signifikansi model (Uji F) dan uji koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengolahan data dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*) dengan program *Eviews 7*, telah diperoleh hasil uji asumsi klasik. Pada uji multikolinearitas variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai *Centered VIF* sebesar $1,523825 < 5$, variabel pengangguran menunjukkan nilai *Centered VIF* sebesar $1,648909 < 5$ dan variabel belanja pemerintah menunjukkan nilai *Centered VIF* sebesar $1,216942 < 5$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada ketiga variabel independen tersebut.

Pada uji autokorelasi diperoleh nilai Probabilitas *F-statistic* sebesar $0,2305 > \alpha = 5\%$ yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi.

Uji normalitas menunjukkan Probabilitas *Jarque-Bera* sebesar $0,571171 > \alpha = 5\%$ yang telah ditentukan, maka residual terdistribusi dengan normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah terpenuhi.

Pada uji linearitas, diperoleh nilai Probabilitas *F-statistic* yang menunjukkan angka sebesar $0,1956 > \alpha = 5\%$ yang telah ditentukan, maka asumsi linearitas telah terpenuhi.

Pada uji heterokedastisitas menunjukkan nilai Probabilitas *F-statistic* sebesar $0,1241 > \alpha = 5\%$ yang telah ditentukan, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi ini.

Dari hasil uji koefisien regresi individual (Uji T) diperoleh nilai Probabilitas *t-statistic* variabel pertumbuhan ekonomi sebesar $0,0375 < \alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan variabel pengangguran sebesar $0,0480 < \alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak, sehingga variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel pengangguran secara individu berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara variabel belanja pemerintah menunjukkan nilai Probabilitas *t-statistic* sebesar $0,1688 > \alpha = 5\%$ maka H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Pemerintah secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara, dari hasil uji signifikansi model (Uji F) menunjukkan nilai Probabilitas *F-statistic* sebesar $0,000709 < \alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan.

Hasil perhitungan uji koefisien determinasi (R^2) memperoleh nilai R^2 sebesar 0,745252 yang berarti Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan sebesar 0,745252 (74,52%), sedangkan sisanya 25,48% ($100\% - 74,52\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Dari hasil analisis regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*) menggunakan program *Eviews 7* menunjukkan nilai koefisien untuk tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen, dapat ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Berganda

Dependent Variable: LOG(KEMISKINAN)
 Method: Least Squares
 Date: 07/26/19 Time: 21:27
 Sample: 2003 2018
 Included observations: 16

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LOG(PERTUMBUHAN_EKONO				
MI)	-0.294529	0.125946	-2.338538	0.0375
LOG(PENGANGGURAN)	0.152095	0.069097	2.201171	0.0480
LOG(BELANJA PEMERINTAH)	0.009378	0.006405	1.464166	0.1688
C	6.101699	0.448492	13.60492	0.0000
R-squared	0.745252	Mean dependent var		6.333350
Adjusted R-squared	0.681564	S.D. dependent var		0.103280
S.E. of regression	0.058281	Akaike info criterion		-2.634764
Sum squared resid	0.040760	Schwarz criterion		-2.441617
Log likelihood	25.07811	Hannan-Quinn criter.		-2.624873
F-statistic	11.70176	Durbin-Watson stat		1.451760
Prob(F-statistic)	0.000709			

Sumber : Output *Eviews 7*, diolah tahun 2019

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Dari hasil analisis penelitian ini, variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar $-0,294529$ dan menunjukkan hubungan negatif terhadap kemiskinan, variabel pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan nilai Probabilitas *t-statistic* sebesar $0,0375$ lebih kecil dibandingkan dengan nilai $\alpha = 5\%$ yang menandakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa saat pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan 1% maka akan menurunkan jumlah kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018 sebesar $0,294\%$. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Waruwu, S.J (2016) bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori yang ada bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan karena pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting di dalam mengatasi penurunan kemiskinan.

Fane dan War dalam Maipita, I (2014: 63), jika pertumbuhan yang dapat meningkatkan return terhadap faktor yang merupakan sumber pendapatan bagi penduduk miskin semakin besar, maka akan semakin besar pula kemungkinan dalam menurunkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Menurut Kuznet dalam Nisbah, F (2018), terdapat hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan, hal ini dikarenakan terjadi peningkatan kemiskinan pada tahap awal pelaksanaan pembangunan ekonomi dan terjadi penurunan kemiskinan pada tahap akhir pelaksanaan pembangunan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

2. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Dari hasil analisis penelitian ini, variabel pengangguran menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar $0,152095$ dan menunjukkan hubungan positif terhadap kemiskinan, dan variabel pengangguran menunjukkan nilai Probabilitas *t-statistic* sebesar $0,0480$ lebih kecil dibandingkan dengan nilai $\alpha = 5\%$ yang menandakan bahwa variabel pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa saat terjadi peningkatan pengangguran sebesar 1% akan meningkatkan jumlah kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018 sebesar $0,152\%$. Hal tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Irhamni (2018) yang menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kemiskinan karena tingginya angka pengangguran akan menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan mengalami kemiskinan, dan hal tersebut juga sesuai dengan teori-teori yang ada yang menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Menurut Todaro dalam Nisbah, F (2018) pengangguran dan kemiskinan memiliki hubungan yang sangat erat. Rendahnya kualitas hidup masyarakat dijabarkan ke dalam bentuk pendapatan yang rendah, tempat tinggal yang tidak memadai, kesehatan yang buruk, pendidikan yang terbatas, rendahnya angka fertilitas, usia harapan hidup yang relatif sangat singkat serta rendahnya

kesempatan dalam memperoleh pekerjaan. Rendahnya kesempatan dalam memperoleh suatu pekerjaan berarti pengangguran. Tingginya angka pengangguran disuatu daerah akan berdampak pada pengurangan pendapatan masyarakat karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga akan jatuh miskin.

3. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan

Dari hasil analisis penelitian ini, variabel belanja pemerintah menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,009378 dan menunjukkan hubungan positif terhadap kemiskinan, namun variabel belanja pemerintah tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, dapat dilihat dari nilai Probabilitas *t-statistic* variabel belanja pemerintah sebesar 0,1688 lebih besar dibandingkan dengan nilai *alpha* (α) = 5% yang telah ditentukan. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Asrianti (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia” bahwa belanja pemerintah tidak menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, sehingga pemerintah perlu memperhatikan ketepatan dalam penggunaan belanja daerah agar dapat merangsang aktifitas ekonomi di masyarakat dan mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan publik.

KESIMPULAN

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_1) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -0,294529 dan nilai Probabilitas *t-statistic* sebesar $0.0375 < \alpha = 5\%$. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi (X_1) memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.
2. Variabel Pengangguran (X_2) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,152095 dan menunjukkan nilai Probabilitas *t-statistic* sebesar $0.0480 < \alpha = 5\%$. Hal tersebut menandakan bahwa variabel Pengangguran (X_2) memiliki pengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.
3. Variabel Belanja Pemerintah (X_3) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,009378 dan berhubungan positif terhadap kemiskinan. Nilai Probabilitas *t-statistic* variabel Belanja Pemerintah (X_3) sebesar $0.1688 > \alpha = 5\%$ yang artinya variabel Belanja Pemerintah (X_3) tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018.
4. Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X_1), Pengangguran (X_2) dan Belanja Pemerintah (X_3) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2003-2018. Hal ini didasarkan pada hasil uji signifikansi model (Uji F) yang menunjukkan nilai Probabilitas *F-statistic* sebesar $0,000709 < \alpha = 5\%$.

IMPLIKASI

1. Perlu adanya penambahan variabel independen (bebas) lain yang berhubungan serta memiliki pengaruh terhadap kemiskinan diluar variabel independen pada

penelitian ini, mengingat adanya variabel lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan dengan harapan dapat menghasilkan penelitian yang lebih menyeluruh.

2. Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga akan menurunkan jumlah kemiskinan.
3. Dalam upaya pengentasan kemiskinan pemerintah diharapkan dapat merancang kebijakan dalam ketenagakerjaan dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya agar membuka peluang bagi para pengangguran untuk meningkatkan pendapatan yang akan berdampak pada penurunan kemiskinan.
4. Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengupayakan pengentasan kemiskinan dengan merancang berbagai kebijakan, program serta mengalokasikan belanja pemerintah agar dapat digunakan secara efisien dan terdistribusi dengan baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat dan menurunkan kemiskinan.
5. Untuk penelitian mendatang, diharapkan untuk menambahkan variabel independen (bebas) lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan, seperti Investasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Penduduk, Pendapatan Per Kapita dan Jumlah Penduduk di daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrianti. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Belanja Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Bank, W. (2019, Juli 16). *World Development Report: Attacking Poverty*. Retrieved from World Bank: siteresources.worldbank.org
- BAPPEDA. (2019, Juli 23). *List Data Dasar*. Retrieved from Aplikasi Dataku: <http://bappeda.jogjaprovo.go.id>
- Bappenas. (2019, Juli 16). Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Retrieved from Diagnosis Kemiskinan Bappenas: www.bappenas.go.id
- BPS. (2019, Juli 21). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2006/2007*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY: <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2007/04/17/0a649d1de71822f44f774650/daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2006-2007>
- BPS. (2019, Juli 21). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2007*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY: <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2009/01/01/a5dc7f83caba19010ff0a3a3/diy-dalam-angka-2007>
- BPS. (2019, Juli 21). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2009*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY: <https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2009/04/17/99019d1dd3d7446405a41c31/daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2009.html>

- BPS. (2019, Juli 22). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2010*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2011/01/27/9f1dda06cd0022587c9a1f90/daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2010>
- BPS. (2019, Juli 22). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2011*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2012/01/12/81613a2fb3f06135a8288a33/daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2011>
- BPS. (2019, Juli 22). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2012*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2012/10/16/36fb59684e17406398dd7485/daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2012>
- BPS. (2019, Juli 22). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2013*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2013/10/01/849cc90bb1e0a20aed2917fb/daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2013>
- BPS. (2019, Juli 22). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2014/11/27/45a3ec0d044f535fc50a0992/daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2014>
- BPS. (2019, Juli 22). *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2015*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2015/11/16/a5900334e7d45e855906c4e7/daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2015>
- BPS. (2019, Juli 21). *DIY Dalam Angka 2003*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2003/08/01/bb0790b8e318b323fd729033/diy-dalam-angka-2003>
- BPS. (2019, Juli 21). *DIY Dalam Angka 2004*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2009/01/01/23e61809c970f0957ad0600e/diy-dalam-angka-2004>
- BPS. (2019, Juli 21). *DIY Dalam Angka 2005*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2006/09/22/0784d0259b9884dc59f76aed/diy-dalam-angka-2005>
- BPS. (2019, Juli 23). *Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2018*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2018/08/16/ec8403f8694d2ff343d36d88/provinsi-daerah-istimewa-yogyakarta-dalam-angka-2018>
- BPS. (2019, Juli 23). *Provinsi DI Yogyakarta Dalam Angka 2016*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2016/07/15/1d15896048fabd5f7c48bff7/provinsi-di-yogyakarta-dalam-angka-2016>

- BPS. (2019, Juli 23). *Provinsi DI Yogyakarta Dalam Angka 2017*. Retrieved from Badan Pusat Statistik DIY:
<https://yogyakarta.bps.go.id/publication/2017/08/11/7da495dfa8657275f9da077b/provinsi-di-yogyakarta-dalam-angka-2017>
- Fadlillah, N., Sukiman, & Dewi, A. S. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013. *EKO-REGIONAL*, 26.
- Fasholla, R. T. (2018). *Pengaruh Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Jumlah Kemiskinan di Kabupaten Cilacap Periode Tahun 2011 – 2016*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Irhamni. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 1986-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 97.
- Kemenkeu. (2019, Juli 15). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*. Retrieved from JDIH Kemenkeu:
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2000/105Tahun2000PP.html>
- Kemenkeu. (2019, Juli 15). *Undang-Undang Republik Indonesia*. Retrieved from JDIH Kemenkeu:
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2003/17Tahun2003UU.html>
- Maipita, I. (2014). *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan* (1 ed.). (Fitrawaty, Ed.) Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maipita, I., Jantan, M. D., & Razak, N. A. (2010). *Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi dan Angka Kemiskinan di Indonesia*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mankiw, N. G. (2006). *Makro Ekonomi*. (L. Fitria, & I. Nurmawan, Trans.) Jakarta: Erlangga.
- Nisbah, F. (2018). *Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo dan Langkat*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi: Teori Pengantar* (3 ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Retrieved 2019
- Suryani, E. (2006). Analisis Faktor Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 95.
- Susiatun, E. (2018). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2007-2016*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

- Waruwu, S. J. (2016). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Wibowo, M. E. (2014). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Widarjono, A. (2016). *Ekonometrika: Pengantar dan Aplikasinya* (4 ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

